

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN DI KELURAHAN KEPUTRAN
SURABAYA (INPRES NOMOR 7 TAHUN 2014)**

Felixianus Ali¹⁾, Amirul Mustofa²⁾

¹⁾²⁾ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: felixianusali79@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan KIP dalam upaya pemerataan pendidikan serta faktor pendukung dan penghambat implementasi KIP. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah staf bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Kepala Sekolah SD Dapena Surabaya, dan Staf Tata Usaha Sekolah Dasar Negeri Keputran Surabaya, Staf Kelurahan Keputran Surabaya, siswa penerima KIP, serta orang tua siswa penerima KIP. Objek penelitian mengenai implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan di Kelurahan Keputran – Surabaya (Inpres No. 7 Tahun 2014). Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi data. Data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran KIP di SD Dapena dan SDN Keputran Surabaya adalah siswa yang memiliki kartu KIP dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). KIP adalah bantuan berupa uang tunai diberikan kepada siswa yang orang tuanya tidak atau kurang mampu membiayai pendidikan anaknya. Hasil dari pelaksanaan KIP dapat mendukung upaya pemerataan pendidikan, hal ini ditandai dengan siswa yang menerima dana KIP memenuhi kriteria kondisi keluarga siswa yang ditentukan dari kepemilikan KPS sehingga siswa yang tidak bersekolah atau pendidikannya terhalang biaya dapat bersekolah serta terwujudnya pendidikan yang merata. Faktor pendukung dalam analisis implementasi KIP di Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari yaitu: (1) Sumber daya sarana dan prasarana, sudah mendukung untuk pelaksanaan program KIP memiliki fasilitas yang memadai seperti komputer dan sistem data yang baik; (2) Karakteristik badan pelaksana dalam dimensi etos kerja dalam melaksanakan tugasnya di Kelurahan Keputran menunjukkan sikap yang peduli dan sabar dalam menghadapi keluhan masyarakat penerima manfaat KIP. Faktor yang menghambat dalam analisis implementasi KIP di Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari yaitu: (1) Sikap agen pelaksana, tenaga pelaksana kebijakan terbilang sangat kurang sehingga menyebabkan sulitnya melakukan pengawasan dan pelaporan penggunaan dana, dan (2) Komunikasi agen pelaksana, aktivitas pelaksana kurang maksimal disebabkan kurangnya perhatian dari pelaksana tingkat atas sehingga informasi penyaluran dana tidak tepat waktu, kesulitan mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Serta faktor keakuratan data yang digunakan sebagai penentu calon penerima KIP masih kurang.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kartu Indonesia Pintar, Pemerataan Pendidikan

Abstract

This study aims to describe the implementation of the KIP policy in an effort to equalize education as well as the supporting and inhibiting factors of KIP implementation. This research used a descriptive qualitative approach. The subjects of this research are the staff of the Basic Education Division of the Surabaya City Education Office, the Principal of SD Dapena Surabaya, and the Administrative Staff of Keputran Surabaya Public Elementary School, Keputran Surabaya Village Staff, KIP recipient students, and parents of KIP recipient students. The object of research is the implementation of the Smart Indonesia Card policy in an effort to equalize education in Keputran Village - Surabaya (Presidential Instruction No. 7 of 2014). Data were collected through observation, interview and documentation methods. Data validity was carried out by means of data triangulation. Data were analyzed by data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the targets of KIP at SD Dapena and SDN Keputran Surabaya are students

who have KIP cards from Low-Income Community (MBR) families. KIP is cash assistance provided to students whose parents are not or less able to pay for their children's education. The results of KIP implementation can support efforts to equalize education, this is indicated by students who receive KIP funds meeting the criteria of student family conditions determined from KPS ownership so that students who do not go to school or whose education is hindered by costs can go to school and the realization of equitable education. Supporting factors in the analysis of KIP implementation in Keputran Village, Tegalsari Sub-district are: (1) Facilities and infrastructure resources, which have supported the implementation of the KIP program, have adequate facilities such as computers and good data systems; (2) Characteristics of the implementing agency in the work ethic dimension in carrying out their duties in Kelurahan Keputran show a caring and patient attitude in dealing with complaints from KIP beneficiaries. Factors that hinder the analysis of KIP implementation in Keputran Village, Tegalsari Subdistrict, are: (1) The attitude of the implementing agent, the policy implementing staff is very lacking, which makes it difficult to supervise and report on the use of funds, and (2) Communication of the implementing agent, the implementing activity is less than optimal due to the lack of attention from the top level implementers so that information on the distribution of funds is not timely, difficulty collecting receipts or proof of the use of Smart Indonesia Program (PIP) funds through the Smart Indonesia Card (KIP). As well as the data accuracy factor used as a determinant of prospective KIP recipients is still lacking.

Keywords: *Policy Implementation, Smart Indonesia Card, Education Equity*

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan sangat dibutuhkan bagi setiap insan untuk berkembang dan meningkatkan kemampuan diri. Pendidikan selalu dikaitkan dengan peluang pekerjaan yang pada zaman ini tidak sedikit lowongan pekerjaan menetapkan batasan minimal tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja akan menyebabkan pengangguran semakin meningkat, hal itu akan menyebabkan beban tanggungan keluarga meningkat. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan dan tingkat pendidikan tidak dapat dilepaskan satu sama lain, adanya hubungan yang sangat erat antara kedua hal tersebut sering sekali orang mengistilahkan bahwa berpendidikan rendah identik dengan kemiskinan. Kemiskinan menjadi masalah utama yang harus segera ditangani oleh negara Indonesia dalam upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemiskinan dan pendidikan adalah dua aspek yang memiliki kaitan sangat erat apabila digabungkan dengan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Kemiskinan menyebabkan terbatasnya masyarakat untuk mengakses pendidikan, sedangkan pendidikan bertujuan untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan

kemiskinan yang mereka hadapi. Kemiskinan inilah yang menjadi salah satu penyebab pemerataan pendidikan kurang terlaksana dan sebagai salah satu isu masalah pendidikan di Indonesia. Kesempatan warga miskin untuk mendapatkan pendidikan pun tampaknya masih belum merata. Menurut Sahroni menyebutkan bahwa para elite politik di tingkat pusat maupun daerah masih bergelut pada kepentingan masing-masing sehingga kepentingan kaum miskin yang menjadi amanat tugas mereka malah terabaikan. Akibatnya, kaum miskin terpaksa berjuang sendiri berhadapan dengan dinamika kehidupan yang memperlihatkan muka tak ramah di hadapan mereka. Masalah pembiayaan pendidikan selalu menjadi masalah krusial bagi masyarakat, terutama pada lapisan masyarakat menengah ke bawah. Pendidikan diharapkan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa dimasa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat, berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor penentu suatu bangsa untuk bisa memenangkan kompetisi global.

Pemerintah Indonesia secara formal telah mengupayakan pemerataan pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah, dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun. Upaya-upaya ini nampaknya lebih mengacu pada perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan dilakukan dengan mengupayakan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan tanpa mengenal usia, waktu, tempat mereka tinggal yakni baik di kota maupun desa tetap sama. Program Indonesia Pintar yang ditetapkan oleh pemerintah dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga atau rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Siswa tersebut mendapat bantuan yang berasal dari pusat ini mendorong sekolah untuk mengimplementasikannya secara operasional. Dalam pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar telah dilaksanakan akan tetapi, masih terjadi masalah kecemburuan sosial, dikarenakan siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta masih adanya siswa-siswi yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini terjadi karena adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan pihak-pihak terkait (oknum).

Penyaluran KIP selama tidak tersalurkan dengan baik karena tidak menggunakan data terbaru. Data yang dipakai masih data Badan Pusat Statistik (BPS) 2011 dan diperbarui dari data 2012. Namun, tidak semuanya diperbarui sehingga tidak tepat sasaran. Masalah administrasi masih saja menjadi kendala dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Pada PIP sendiri sebagai penanda dan syarat untuk mendapatkan KIP maka orang tua ataupun keluarga anak harus terdaftar sebagai PKH

(Program Keluarga Harapan) ataupun keluarga pemegang KPS atau KKS yang sering sekali data tidak tepat sasaran.

Penelitian yang akan dilakukan yaitu bagaimana implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar sebagai upaya pemerataan pendidikan dan kendala penerapan KIP ditinjau dari Inpres No 07 Tahun 2014. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimanakah analisis implementasi kebijakan kartu indonesia pintar (KIP) sebagai upaya pemerataan pendidikan di kelurahan Keputran – Surabaya?
2. Bagaimanakah analisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan kartu indonesia pintar (KIP) sebagai upaya pemerataan pendidikan di kelurahan Keputran – Surabaya?

Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP sebagai upaya pemerataan pendidikan di kelurahan Keputran – Surabaya. Untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan kartu indonesia pintar (KIP) sebagai upaya pemerataan pendidikan di kelurahan Keputran – Surabaya.

B. LANDASAN TEORITIS

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang disebut dengan *A Model of The Policy Implementations*. Menurut Van Meter dan Van Horn ada 6 (enam) variabel yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Keenam variabel tersebut adalah: (1) Standar dan sasaran kebijakan; (2) Sumber daya; (3) Hubungan antar organisasi; (4) Karakteristik agen pelaksana; (5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi; serta (6) Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan. Teori tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan publik khususnya untuk mengukur keberhasilan implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan KIP.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio kultural yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan. Tujuan dari Inpres No 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ialah untuk mengatasi permasalahan pemerataan pendidikan yang disebabkan oleh faktor ekonomi atau masalah kemiskinan sehingga siswa tidak memiliki biaya untuk pendidikan dan juga memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah. Dan layanan akses pendidikan dari Inpres Nomor 7 Tahun 2014 tentang KIP yaitu seluruh anak usia 6-21 tahun mendapatkan layanan akses pendidikan sampai tamat yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin.

Evaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan melalui penilaian sejauh mana tujuan kebijakan dapat dicapai, dengan mempertimbangkan ukuran yang realistis dan sesuai dengan kondisi sosio-kultur di tingkat pelaksanaan kebijakan. Apabila ukuran dan target kebijakan terlalu berada dalam ranah idealistik atau utopis, maka pelaksanaannya menjadi sulit untuk diwujudkan.

Dalam analisis penelitian ini dalam menetapkan standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan dalam pengimplementasian Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dinas Pendidikan selaku pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) di Daerah pada awalnya tidak mengetahui dasar penentuan bakal calon penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar karena yang dapat mengambil keputusan dalam menentukan nama calon penerima bantuan Program Indonesia Pintar adalah Kementerian, ini tidak terlepas dari kementerian sebagai pemegang utama Program Indonesia Pintar. Dinas

Pendidikan hanya mengusulkan saja nama-nama bakal calon penerima bantuan Program Indonesia Pintar melalui Dapodik (Data Pokok Pendidik).

Menurut Van Meter dan Van Horn seperti yang disampaikan Widodo, menekankan bahwa untuk mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan, perlu ditetapkan standar dan tujuan khusus yang harus dipenuhi oleh para pelaksana kebijakan. Esensi dari penilaian kinerja kebijakan pada dasarnya mencakup evaluasi terhadap sejauh mana standar dan tujuan tersebut berhasil tercapai.

2. Sumber Daya

Dalam hal ini keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sarana prasarana menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya kebijakan ini harus tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan.

Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Adapun dimensinya yaitu:

a) Sumber Daya Manusia

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan

sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.

b) Sumber Daya Finansial

Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

c) Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) diperlukan peralatan yang memadai seperti gedung, komputer, dan jaringan internet.

3. Hubungan Antar Organisasi

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan publik berjalan efektif, Van Horn dan Van Mater (sebagaimana dikutip dalam Widodo 2007) menekankan pentingnya pemahaman standar dan tujuan oleh individu yang bertindak sebagai pelaksana (*implementors*). Individu yang bertanggung jawab atas mencapai standar dan tujuan kebijakan perlu memahaminya, sehingga penting untuk mengkomunikasikan standar dan tujuan kepada mereka. Komunikasi dalam konteks penyampaian informasi kepada pelaksana kebijakan mengenai standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya. Adapun dimensi dari perilaku hubungan antar organisasi yaitu:

a) Komitmen

Komitmen merupakan sebuah janji pada diri seseorang maupun pada orang lain, dimana komitmen tersebut akan mendorong rasa percaya diri, dan semangat kerja dalam menjalankan tugas menuju perubahan yang lebih baik dalam implementasi.

b) Koordinasi Antar Organisasi

Koordinasi antar organisasi merupakan sebuah kegiatan yang rasional oleh sejumlah lembaga atau instansi yang saling berhubungan. Koordinasi merupakan sebuah tali pengikat dalam organisasi yang menghubungkan para aktor yang didalamnya terdapat kerjasama untuk mencapai tujuan dalam implementasi.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam hal ini jika tidak adanya kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Ini terkait dengan situasi di mana pelaksanaan kebijakan memerlukan tingkat kedisiplinan dan ketat pada beberapa kebijakan tertentu. Di sisi lain, dalam konteks lainnya, dibutuhkan agen pelaksana yang bersifat demokratis dan mampu meyakinkan. Selain itu, pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan melibatkan cakupan atau wilayah yang luas. Faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan di dalam organisasi dan antar organisasi adalah tingkat komitmen dan

koordinasi, sebagaimana dijelaskan oleh Winter (2003) sebagaimana yang dikutip oleh Rahmawati (2020).

Perilaku implementor merupakan kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi kebijakan dalam implementasi. Adapun dimensinya yaitu:

a) Kontrol Organisasi

Kontrol organisasi merupakan bagian penting dalam sistem manajemen. Kontrol organisasi merupakan suatu mekanisme dari implementasi kebijakan dalam proses kontrol tersebut membantu tingkah laku manusia yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan KIP tersebut untuk tetap fokus mengawasi pelaksanaan kebijakan agar tetap sesuai dengan rencana. Bantuan dana Kartu Indonesia Pintar diberikan bukan hanya sekedar untuk memberikan dana kepada masyarakat miskin tetapi harus benar-benar digunakan untuk kepentingan anak bersekolah untuk itu pelaksana harus tetap mengontrol dana tersebut.

b) Etos Kerja

Etos kerja merupakan perilaku individu yang baik dalam suatu kelompok yang sedang melaksanakan tugasnya dalam implementasi kebijakan.

c) Norma-Norma Profesional

Norma profesional yang dimaksud dalam implementasi kebijakan yaitu sikap dari pelaksana mengikuti norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan tidak memihak kepada satu pihak dan tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana.

5. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Aspek terakhir yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal memainkan peran dalam mendukung keberhasilan kebijakan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang tidak mendukung,

menjadi sumber potensial masalah, dan dapat mengakibatkan kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan, diperlukan kondisi lingkungan eksternal yang mendukung dan kondusif. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

6. Disposisi Pelaksana Implementor Kartu Indonesia Pintar

Tidak adanya pengawas khusus yang dikirim dari pemerintah membuat pengawasan sulit dilakukan, dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan dana tidak ada. Menurut Van Meter dan Van Horn seperti yang dikutip dalam Agustino (2006), keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan. Ini kemungkinan besar terjadi karena kebijakan yang diimplementasikan bukan hasil formulasi oleh warga setempat yang memiliki pemahaman mendalam terhadap permasalahan dan persoalan yang mereka hadapi. Sebaliknya, kebijakan publik umumnya bersifat top down, sehingga para pengambil keputusan mungkin tidak mengetahui atau bahkan tidak mampu mengidentifikasi kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang harus diatasi.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti melakukan dengan cara yaitu pengamatan secara langsung di tempat penelitian yaitu di Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Provinsi Jawa Timur. Subjek penelitian ini meliputi Kepala Sekolah SD Dapena, Kepala Sekolah SDN 1 Keputran, Lurah Keputran, Staf Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dan masyarakat penerima manfaat KIP. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan riset perpustakaan untuk memperoleh informasi. Dalam analisis data

dengan kesimpulan-kesimpulan dalam bentuk uraian-uraian tanpa mempergunakan hitungan dalam bentuk angka-angka.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Kartu Indonesia Pintar merupakan bantuan dari pemerintah untuk siswa kurang mampu atau miskin, dengan harapan mengurangi anak putus sekolah. Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014. Program Indonesia Pintar (PIP) diluncurkan di bawah 3 naungan kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Sosial (Kemensos) yang seterusnya akan dirasakan oleh masyarakat melalui Dinas Pendidikan di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

Semua warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, namun belum semua warga negara Indonesia mampu mengakses pendidikan sehingga tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan wajib belajar belum sepenuhnya tercapai. Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah masalah kemiskinan yang menjauhkan masyarakat dalam menjangkau pendidikan. Kemiskinan dan pendidikan adalah dua aspek yang memiliki kaitan sangat erat apabila digabungkan dengan kesejahteraan yang ada di Masyarakat. Kemiskinan menyebabkan terbatasnya masyarakat untuk mengakses pendidikan, sedangkan pendidikan bertujuan untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan kemiskinan yang mereka hadapi. Kemiskinan inilah yang menjadi salah satu penyebab pemerataan pendidikan kurang terlaksana dan sebagai salah satu isu masalah pendidikan di Indonesia.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian atas dimensi ukuran dan tujuan kebijakan yaitu:

Pertama, tujuan dari Inpres Nomor 7 tahun 2014 tentang Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ialah untuk mengatasi

permasalahan pemerataan pendidikan yang disebabkan oleh faktor ekonomi atau masalah kemiskinan sehingga siswa tidak memiliki biaya untuk pendidikan dan juga memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah. KIP memiliki tujuan yang sangat relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia, yaitu mengatasi ketidakmerataan pendidikan yang disebabkan oleh faktor ekonomi atau masalah kemiskinan. Memberikan solusi konkrit terhadap permasalahan biaya pendidikan dan kebutuhan perlengkapan sekolah yang dialami oleh siswa dari keluarga kurang mampu. Namun dalam pelaksanaannya tidak terdapat informasi lebih lanjut tentang langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut.

Kedua, layanan akses pendidikan dari Inpres No 7 Tahun 2014 tentang KIP yaitu seluruh anak usia 6-21 tahun mendapatkan layanan akses pendidikan sampai tamat yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin. Menetapkan target yang jelas, yaitu memberikan layanan akses pendidikan kepada seluruh anak usia 6-21 tahun dari keluarga kurang mampu atau miskin. Menunjukkan fokus pada kelompok sasaran yang paling membutuhkan dukungan. Namun tidak ada indikator khusus yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan pendidikan yang diberikan. Kurangnya informasi tentang bagaimana program memastikan bahwa dana dan layanan pendidikan benar-benar mencapai anak-anak yang membutuhkan.

Jika dilihat dari penetapan standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam pengimplementasian Program Indonesia Pintar (PIP) belum sesuai dengan apa yang dikatakan Van Meter dan Van Horn 1975 bahwa standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan harus jelas dan terstruktur sehingga kebijakan dapat terealisasikan dengan baik kepada masyarakat yang mana benar-benar membutuhkan bantuan Program Indonesia Pintar agar mereka dapat mengenyam pendidikan. Pentingnya evaluasi

terus-menerus dan penyempurnaan kebijakan untuk memastikan implementasi KIP mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan dampak yang positif pada pemerataan pendidikan di Indonesia.

2. Sumber Daya

Secara kualitas sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang dimiliki oleh Kota Surabaya dalam menjalankan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang sekolah dasar pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya tahun 2020 bisa dikatakan sudah memenuhi kriteria karena sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Akan tetapi Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab terhadap Program Indonesia Pintar belum cukup untuk melingkupi seluruh sekolah SD, SMP di Kota Surabaya.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan SDM atau pegawai yang ikut serta dalam implementasi Program Indonesia Pintar belum ditentukan sesuai dengan keahliannya pegawai, karena di lapangan tidak diterapkan kriteria tertentu dan spesifik akan tetapi yang utama harus menguasai Informasi dan Teknologi (IT). Sumber daya anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak memberi anggaran untuk kegiatan operasional Program Indonesia Pintar di SDN 1 Keputran.

Implementasi PIP melalui KIP dilihat dari sumber daya peralatan sudah mendukung untuk pelaksanaan program tersebut. Sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya sudah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Sumber daya manusia masih belum dipilah sesuai dengan kriteria yang kapabilitas dalam melaksanakan program KIP. Hanya bertugas untuk menyalurkan dana dan memverifikasi data siswa calon penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Sedangkan pihak pelaksana di sekolah memiliki kepala sekolah dan operator sekolah untuk terlibat langsung dengan data-data calon penerima di sekolah. Sumber daya finansial yang diberikan oleh pemerintah pusat sebetulnya sudah sangat

mencukupi dimana Kota Surabaya di tahun 2020 mampu mencairkan sekitar 88 % dana yang dapat dicairkan. Sehingga masih banyak siswa yang belum mendapatkan manfaat bantuan Program Indonesia Pintar.

Perlunya evaluasi lebih lanjut distribusi dana dan verifikasi data siswa untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala administratif yang mungkin ada. Tingkatkan koordinasi antara Dinas Pendidikan dan sekolah untuk memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari verifikasi data hingga distribusi dana, berjalan dengan baik. Pastikan pemilahan SDM sesuai dengan kapabilitasnya agar setiap anggota tim dapat memberikan kontribusi maksimal dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Terus tingkatkan komunikasi antara semua pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan, sekolah, dan pemerintah pusat, untuk meningkatkan efektivitas implementasi Program Indonesia Pintar.

3. Hubungan Antar Organisasi

Dilihat dari aspek kompetensi dan jumlah staf dalam hal pelaksanaan implementasi kebijakan program Indonesia pintar pada jenjang sekolah dasar di Kelurahan Keputran, Kemendikbud memberikan Petunjuk Teknis (Juknis) kepada Dinas Pendidikan sebagai acuan untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar melalui Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Untuk pendataan sampai pencairan dana masyarakat selalu didampingi oleh staf Dinas Pendidikan dan staf Kelurahan karena memang yang menjadi pelaksana yang paling dekat dengan masyarakat yaitu pelaksana dari tingkat desa dan sekolah. Peranan staf Dinas Pendidikan Kota sebagai fasilitator yaitu menyambung kepentingan pemerintah kepada pelaksana kebijakan di tingkat kecamatan maupun Kelurahan agar kebijakan tersebut berhasil. Ada yang sudah tercapai dengan baik dan ada yang belum tercapai ini tidak terlepas dari masih adanya kendala

dalam penyaluran dana yang masih belum efektif.

Dalam rangka meningkatkan implementasi Program Indonesia Pintar, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara Dinas Pendidikan, Kelurahan, dan Kemendikbud, serta peningkatan kompetensi dan jumlah staf yang memadai di setiap tingkatan organisasi terlibat. Selain itu, upaya perbaikan dalam penyaluran dana juga perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Proses pentransferan berita ke bawah di dalam organisasi atau dari organisasi ke organisasi lain, sering mengalami gangguan baik sengaja atau tidak disengaja. Yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan kebijakan KIP di sekolah yaitu kepala sekolah sedangkan yang mengontrol masalah kebijakan sampai dengan data siswa penerima KIP yaitu guru yang ditunjuk sebagai staf kesiswaan sekaligus sebagai operator sekolah. Persyaratan pengambilan dana tidak hanya didampingi guru tetapi juga harus membawa surat rekomendasi dari kepala sekolah. Dalam hal pencairan dana tetap harus tetap mengikuti prosedur salah satunya yaitu melalui rekomendasi dari kepala sekolah dulu dan ditemani oleh guru agar bisa tetap diawasi pengambilan dananya. Norma profesional yang dimaksud dalam implementasi kebijakan KIP yaitu sikap dari pelaksana mengikuti norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan tidak memihak kepada satu pihak dan tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana.

Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan Sekolah sudah berjalan cukup baik dimana Dinas pendidikan selalu memberikan sosialisasi kepada Sekolah. Akan tetapi masih ada saja kendala yang dihadapi seperti masih adanya kesalahan informasi berupa data- data calon penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diusulkan oleh sekolah melalui data Dapodik (Data Pokok Pendidik).

Dengan mengidentifikasi dan memahami aspek-aspek tersebut, perbaikan, dan peningkatan dapat diimplementasikan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan Kartu Indonesia Pintar di tingkat sekolah. Evaluasi rutin dan kerja sama yang baik antara Dinas Pendidikan dan sekolah juga penting untuk mengatasi kendala yang muncul selama pelaksanaan kebijakan.

5. Disposisi Pelaksana Implementor Kartu Indonesia Pintar

Kurangnya pelaksana KIP membuat para staf kewalahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugasnya di kantor. kurangnya tenaga pelaksana mengakibatkan sulitnya mengawasi secara langsung ke rumah siswa mengenai penggunaan dana oleh orangtua siswa. karena tidak adanya pengawasan khusus, maka sangat sulit melakukan pengawasan dana yang telah diterima oleh orangtua siswa, hal yang ditakutkan jika dana tersebut digunakan untuk keperluan lain bukannya untuk keperluan sekolah anaknya.

Salah satu bentuk pelaporan dana yang sesuai yaitu memberikan kuitansi setiap membelanjakan dana tersebut pelaporan dana dalam bentuk kuitansi menjadi alasan orangtua siswa tidak datang ke sekolah untuk bertanda tangan ketika sudah menerima dana karena mereka tidak diberikan kwitansi ketika berbelanja. Ketidaktransparan dalam pelaporan dana dapat meningkatkan risiko penggunaan dana untuk keperluan selain pendidikan, sehingga merugikan tujuan utama dari kebijakan KIP. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan jumlah staf pelaksana, penyediaan pelatihan, penyederhanaan prosedur, dan penerapan teknologi untuk mempermudah pelaporan dan tanda tangan elektronik. Selain itu, sosialisasi dan komunikasi yang baik kepada orangtua siswa juga penting untuk memastikan pemahaman dan partisipasi mereka dalam implementasi kebijakan KIP.

6. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Dari kondisi eksternal yang penulis lihat dari hasil penelitian bahwa kondisi di Kelurahan Keputran telah memberikan dampak dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar pada jenjang Sekolah Dasar. Kelurahan Keputran memiliki kondisi sosial yang beragam, dimana adanya ketidaksetaraan dalam akses pendidikan. Beberapa keluarga mungkin tidak memahami atau menghargai pentingnya pendidikan, sehingga implementasi PIP bisa menghadapi resistensi dari beberapa anggota masyarakat. Tingkat ekonomi yang beragam di Kelurahan Keputran dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi PIP. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil mungkin lebih cenderung melibatkan anak-anak mereka dalam pekerjaan atau aktivitas lainnya daripada melanjutkan pendidikan. Dimana banyaknya hambatan yang diberikan oleh lingkungan sosial, ekonomi, sosial dan politik dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kelurahan Keputran. Adanya budaya atau norma sosial di masyarakat yang mungkin kurang mendukung kebijakan pendidikan, seperti prioritas lebih tinggi terhadap pekerjaan atau kebutuhan ekonomi sehari-hari. Adanya kesenjangan ekonomi bisa menyebabkan kesulitan bagi keluarga dengan pendapatan rendah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tambahan yang tidak dicakup oleh PIP. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat pendidikan dapat menjadi hambatan utama. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pendidikan dan dampak positifnya pada masa depan anak-anak mereka.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa aspek yang berpengaruh terhadap efektivitas program. Komunikasi antar organisasi,

komitmen dan koordinasi pelaksanaan, serta sumber daya kartu Indonesia pintar adalah faktor-faktor yang telah dianalisis. Kurangnya sumber daya manusia, ketidakakuratan data, sikap agen pelaksana, dan kendala komunikasi menjadi hambatan utama dalam implementasi program ini. Sementara itu, sumber daya sarana dan prasarana serta karakteristik badan pelaksana mendukung keberhasilan program ini.

2. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada:

- a) Bagi Pemerintah
 - (1) Memperbaiki tata kelola dan transparansi dalam pengelolaan dana KIP.
 - (2) Membentuk tim monitoring KIP untuk memastikan pelaksanaan yang efektif.
 - (3) Memberikan kewenangan lebih kepada pihak sekolah dalam pengambilan keputusan.
- b) Bagi Sekolah
 - (a) Melakukan pembinaan intensif terhadap siswa penerima KIP untuk meningkatkan mutu pendidikan.
 - (b) Mengundang orangtua siswa saat penyaluran dana KIP.
 - (c) Mengelola data, arsip, dan dokumen sekolah dengan baik serta membuat backup data.
- c) Bagi Masyarakat

Mendorong kampanye penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

REFERENSI

- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Antartila, R. A. (2019). Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Meningkatkan Mutu

- Pendidikan Masyarakat Miskin di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Global*, 4(1), 1–12.
- Joko, W. (2007). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Leo, A. (2006). *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Lomban, Branden, Sarah, S., & Welly, W. (2023). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar di SD Negeri Inpres Desa Kayuwatu Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 3(2), 24–32.
- Muhammad, F., Usep, D., & Kariena, F. (2021). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 1 (8), 121–132.
- Muhammad, S. (2013). *Mendidik dan Melatih Entrepreneur Muda: Membuka Kesadaran Atas Pentingnya Kewirausahaan Bagi Anak Didik, Kewirausahaan Bagi Anak Didik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ningsih, S. R., Damanik, I. S., Gunawan, I., & Saputra, W. (2017). Sistem Pendukung Keputusan Dengan Menggunakan Metode Electre Dalam Menentukan Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) (Studi Kasus: SD Swasta Al-Washliyah Moho Kabupaten Simalungun). *KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer)*, 1(1).
- Rahmawati, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten di Kabupaten Bone. *Jurnal Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(1), 1–14.

